



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, perlu pengaturan pola tanam dan tata tanam yang teratur dan terarah untuk mensukseskan usaha pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2013/2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2013/2014.

Pasal 1

Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2013/2014 di Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 601

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 61
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENGATURAN POLA TANAM DAN
RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM
TANAM TAHUN 2013/2014

**PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
UNTUK MUSIM TANAM 2013/2014**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam ini yang dimaksud dengan :

a. Pola Tanam

Adalah suatu pembakuan daripada jenis tanaman yang harus di tanam pada suatu lahan serta periode musim tanam tertentu.

b. Rencana Tata Tanam

Adalah ketentuan tentang alokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.

c. Masa Tanam (MT)

Adalah masa atau kurun waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (misalnya padi, polowijo, tebu dan tanaman lain) dalam batas yang telah ditetapkan.

d. Padi Gadu

Adalah tanaman padi yang ditanam pada masa Tanam Kedua (MT.II) yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Tanam atau dinamakan Padi Gadu Ijin.

e. Sistim Golongan

Adalah suatu sistem pemberian air secara tetap dan (terus menerus) dalam hal mana pengaturan penanaman tanaman diatur dalam bentuk kelompok-kelompok (golongan) pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.

f. Irigasi

Adalah suatu penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun bawah tanah meliputi kegiatan mengalirkan secara teratur dari sumber air, membagi-bagi air tersebut, serta membuang air yang sudah tidak diperlukan lagi.

g. Daerah Irigasi (D.I)

Adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air irigasi dari Jaringan Irigasi, yang terdiri dari :

1. Daerah Irigasi Teknis

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang telah dibagi dalam beberapa petak serta mempunyai saluran-saluran pembawa, bangunan-bangunan termasuk bangunan ukur, saluran-saluran pembuang yang lengkap dan permanen; dilengkapi pintu pengatur dan pengukur.

2. Daerah Irigasi Semi Teknis

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang telah dibagi dalam beberapa petak, mempunyai saluran-saluran pembawa, akan tetapi belum ada bangunan-bangunan pembagi air yang permanen; dilengkapi pintu pengatur dan pengukur.

3. Daerah Irigasi Sederhana

Adalah suatu kesatuan wilayah/sawah yang sama sekali belum ada bangunan-bangunan irigasinya yang permanen; tanpa pintu pengatur dan pengukur.

h. Jaringan Irigasi

Adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari pengambilan, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan-bangunan serta jalan inspeksi yang terdiri dari :

1. Jaringan Irigasi Utama

Adalah Jaringan irigasi yang terdiri dari pengambilan utama, saluran primer, saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan-bangunan pada saluran primer, sekunder dan pembuang serta jalan inspeksi.

2. Jaringan Irigasi pada tingkat Usaha Tani

Adalah jaringan irigasi yang memberikan air secara langsung ke petak-petak sawah, terdiri dari saluran-saluran tersier dan kwarter, saluran pembuang serta bangunan-bangunan dan jalan-jalan sawah.

i. Saluran Irigasi

Adalah bentuk fisik irigasi yang merupakan jalan air dan terdiri atas :

1. Saluran Primer (Induk)

Adalah saluran yang mendapatkan air dari bendung atau sumber lainnya.

2. Saluran Sekunder

Adalah saluran yang merupakan cabang dari saluran primer (induk).

3. Saluran Tersier

Adalah saluran yang mengairi satu wilayah sawah yang disebut petak tersier.

4. Saluran Kwarter

Adalah saluran yang mengairi satu blok yang disebut juga petak tersier, dan saluran ini merupakan cabang dari saluran tersier.

j. Petak Tersier

Adalah himpunan petak tanah/blok dari suatu petak tersier yang memperoleh air irigasi dari saluran tersier.

k. Petak Kwarter

Adalah petak/blok dari suatu petak tersier yang memperoleh air irigasi dari saluran tersier.

l. Pengaturan Giliran

Adalah suatu cara pengaturan pemberian air irigasi dimusim kemarau antar saluran sekunder, saluran tersier dan petak tersier yang disebabkan oleh kurangnya air yang tersedia pada sumbernya.

II. PEMBAGIAN KELOMPOK LAHAN PERSAWAHAN

Lahan sawah dibagi menjadi beberapa kelompok Daerah irigasi, dan disesuaikan pola dengan jenis Daerah Irigasi adalah sebagai berikut :

a. Daerah Irigasi Teknis (ada 61 Bendung)

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Bd. Glintiran | 22. Bd. Luboyo I | 43. Bd. Brambang |
| 2. Bd. Bonjoran | 23. Bd. Gatelan | 44. Bd. Ranggah |
| 3. Bd. Jeruk | 24. Bd. Gambiran | 45. Bd. Pangkalan |
| 4. Bd. Lencer | 25. Bd. Sani | 46. Bd. Bendo |

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Bd. Puring | 26. Bd. Blaru | 47. Bd. Cikal 1 |
| 6. Bd. Pengarep | 27. Bd. Tempur II | 48. Bd. Sat |
| 7. Bd. Pakis | 28. Bd. Kramat | 49. Bd. Langgen |
| 8. Bd. Dlingo | 29. Bd. Gandu | 50. Bd. Sentul |
| 9. Bd. Cikal II | 30. Bd. Pranakan 2 | 51. Bd. Bangkleyan |
| 10. Bd. Widodaren | 31. Bd. Pranakan 1 | 52. Bd. Pandak |
| 11. Bd. Dungguwosono | 32. Bd. Wedusan | 53. Bd. Kenanti |
| 12. Bd. Regaloh | 33. Bd. Winong | 54. Bd. Lenggi |
| 13. Bd. Jati | 34. Bd. Wuluhan | 55. Bd. Klb. Wilalung |
| 14. Bd. Jlubang | 35. Bd. Ngasem | 56. Bd. Klb. Kanan |
| 15. Bd. Sidonggo | 36. Bd. Cungpirit | 57. Bd. Krng. winong |
| 16. Bd. Marnopengkok | 37. Bd. Surat 1 | 58. Bd. Cengklik |
| 17. Bd. Ngurensiti 1 | 38. Bd. Surat 2/Klopo | 59. Bd. Jabangbayi |
| 18. Bd. Luboyo 2 | 39. Bd. PTA | 60. Bd. Medani |
| 19. Bd. Ngurensiti 2 | 40. Bd. Sumedang | 61. Bd. Besali |
| 20. Bd. Semirejo | 41. Bd. Cabean | |
| 21. Bd. Bendoroto | 42. Bd. Dungwuluh | |

b. Daerah Irigasi Semi Teknis (ada 84 Bendung)

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Bd. Grasak | 29. Bd. Gendol | 57. Bd. Guwolowo |
| 2. Bd. Jokotuwo | 30. Bd. Keting | 58. Bd. Plosokuning |
| 3. Bd. Kemadoh | 31. Bd. Jati | 59. Bd. Suromanai |
| 4. Bd. Truno | 32. Bd. Bandil | 60. Bd. Sripanggung |
| 5. Bd. Grasak II | 33. Bd. Gedeg | 61. Bd. Bangau 1 |
| 6. Bd. Noyopupon | 34. Bd. Krikil | 62. Bd. Sowo |
| 7. Bd. Klopo | 35. Bd. Jelak | 63. Bd. Seloputih |
| 8. Bd. Kweni | 36. Bd. Leginah | 64. Bd. Klebut |
| 9. Bd. Santren | 37. Bd. Bloto | 65. Bd. Jrabang 1 |
| 10. Bd. Tendas | 38. Bd. Tambakboyo | 66. Bd. Gentong |
| 11. Bd. Palwadak | 39. Bd. Tapak | 67. Bd. Wungu |
| 12. Bd. Kontrak | 40. Bd. Selowesi | 68. Bd. Trenggulun |
| 13. Bd. Gandu | 41. Bd. Demangan | 69. Bd. Sumber |
| 14. Bd. Pendemgajah | 42. Bd. Bonmacan | 70. Bd. Reco |
| 15. Bd. Sobo | 43. Bd. Beji | 71. Bd. Resulo |
| 16. Bd. Brati | 44. Bd. Ngablak | 72. Bd. Pucung |
| 17. Bd. Jingkrung | 45. Bd. Dikir | 73. Bd. Landoh |
| 18. Bd. Sombron | 46. Bd. Ngasem | 74. Bd. Penceng |
| 19. Bd. Tunglur | 47. Bd. Ingas | 75. Bd. Koripan |

- | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20. Bd. Dungkurungan | 48. Bd. Sadat | 76. Bd. Bogo |
| 21. Bd. Mangin | 49. Bd. Krasak | 77. Bd. Gabus |
| 22. Bd. Dungsono | 50. Bd. Tempur | 78. Bd. Jogan |
| 23. Bd. Karanganyar | 51. Bd. Rogo | 79. Bd. Soko |
| 24. Bd. Jatinom | 52. Bd. Triguno | 80. Bd. Bancak |
| 25. Bd. Grasak | 53. Bd. Tawangrejo | 81. Bd. Mintorahayu |
| 26. Bd. Keden | 54. Bd. Ngomben | 82. Bd. Blado |
| 27. Bd. Pandeyan | 55. Bd. Larangan | 83. Bd. Bangau II |
| 28. Bd. Semangeng | 56. Bd. Sumberlawang | 84. Bd. Waru |

c. Daerah Irigasi Sederhana

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Bd. Kedungtelo | 64. Bd. Kluweh | 127. Pb. Ngembe |
| 2. Bd. Banyutarung | 65. Bd. Pusung | 128. Bd. Trowongso |
| 3. Bd. Trowongso | 66. Bd. Gajah obang | 129. Bd. Ngrayunan |
| 4. Bd. Resulo | 67. Bd. Watusumur | 130. Bd. Blekik |
| 5. Bd. Pilang | 68. Bd. Asemjago | 131. Bd. Batur |
| 6. Bd. Bontro | 69. Bd. Grojogan | 132. Bd. Klepon |
| 7. Bd. Ngasemtempel | 70. Bd. Ngasemgempol | 133. Bd. Sabrangan |
| 8. Bd. Sadang | 71. Bd. Setromulyo | 134. Bd. Tinap |
| 9. Bd. Tritis | 72. Bd. Watugajah | 135. Bd. Watulawang |
| 10. Bd. Waturante | 73. Bd. Tp. menjangan | 136. Bd. Bendo |
| 11. Bd. Dringo | 74. Bd. Kaligawe | 137. Bd. Kebowan |
| 12. Bd. Sonorejo I | 75. Bd. Sonorejo II | 138. Bd. Bodento |
| 13. Bd. Bodentu | 76. Bd. Kowak | 139. Bd. Kuro |
| 14. Bd. Bengkok | 77. Bd. Cangkring | 140. Bd. Cangkring |
| 15. Bd. Cangkringan | 78. Bd. Cangkringan | 141. Bd. Guwo |
| 16. Bd. Kontrak | 79. Bd. Pandansili | 142. Bd. Pandanwangi |
| 17. Bd. Winong | 80. Bd. Dungbuyut | 143. Bd. Dunggudel |
| 18. Bd. Karangjati | 81. Bd. Jangkrian | 144. Bd. Ngemplak |
| 19. Bd. Bongko | 82. Bd. Gedang | 145. Bd. Grumbulasu |
| 20. Bd. Rejoso | 83. Bd. Sarko | 146. Bd. Sarwolo |
| 21. Bd. Segaran | 84. Bd. Suromentolo | 147. Bd. Telenghaji |
| 22. Bd. Telogo | 85. Bd. Cepit | 148. Bd. Jering |
| 23. Bd. Krasak | 86. Bd. Kudo | 149. Bd. Pancuran |
| 24. Bd. Kluweh | 87. Bd. Sidorejo | 150. Bd. Bendo |
| 25. Bd. Husup | 88. Bd. Jrabang II | 151. Bd. Kisik/gebang |
| 26. Bd. Ngipik | 89. Bd. Ngoren | 152. Bd. Pancuran |
| 27. Bd. Wates | 90. Bd. Kuwang | 153. Bd. Pancuran |

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 28. Bd. Tambakromo | 91. Bd. Jurug | 154. Bd. Tempel |
| 29. Bd. Bendo | 92. Bd. Besole | 155. Bd. Dongkolan |
| 30. Bd. Jurangbengkung | 93. Bd. Karang | 156. Bd. Ngobak |
| 31. Bd. Pondok | 94. Bd. Punden | 157. Bd. Roguno |
| 32. Bd. Sanggrahan | 95. Bd. Sarat | 158. Bd. Sowo |
| 33. Bd. Upyuk | 96. Bd. Wedusan | 159. Bd. Bubar |
| 34. Bd. Ngrejeng | 97. Bd. Bangkangan | 160. Bd. Grogolan |
| 35. Bd. Grogolan kidul | 98. Bd. Sambidoyong | 161. Bd. Tolok |
| 36. Bd. Watujaran | 99. Bd. Tempur II | 162. Bd. Surolocok |
| 37. Bd. Sorodan | 100. Bd. Bencong | 163. Bd. Pucung |
| 38. Bd. Dungjangan | 101. Bd. Bugel | 164. Bd. Joho |
| 39. Bd. Kretek | 102. Bd. Krobok | 165. Bd. Bangsal |
| 40. Bd. Socan | 103. Bd. Gayam | 166. Bd. Kd. Bulus |
| 41. Bd. Kd. Liwet | 104. Bd. Kweni | 167. Bd. Ngepreh |
| 42. Bd. Purwosari | 105. Bd. Tempur | 168. Bd. Asemwedus |
| 43. Bd. Bopong | 106. Bd. Cili | 169. Bd. Kampung |
| 44. Bd. Kedengkere | 107. Bd. Kening | 170. Bd. Sumedung |
| 45. Bd. Astrodiwongso | 108. Bd. Bendo | 171. Bd. Blorong |
| 46. Bd. Boro | 109. Bd. Demplo | 172. Bd. Dongkol |
| 47. Bd. Doriyo | 110. Bd. Dungdowo | 173. Bd. Gempyong |
| 48. Bd. Gogik | 111. Bd. Ingas | 174. Bd. Jaten |
| 49. Bd. Jati | 112. Bd. Jerak I | 175. Bd. Jerak II |
| 50. Bd. Kedawung A | 113. Bd. Kedondong | 176. Bd. Kinto I |
| 51. Bd. Kinto II | 114. Bd. Klutuk B | 177. Bd. Koluro |
| 52. Bd. Kontrak | 115. Bd. Maridin | 178. MA. Plingiran |
| 53. MA. Plintahan | 116. Bd. Modo | 179. Bd. Narukan |
| 54. Bd. Ngesong | 117. Bd. Ori | 180. Bd. Pakel |
| 55. Bd. Pondorejo | 118. Bd. Radiyah | 181. Bd. Resulo |
| 56. Bd. Saripah | 119. Bd. Sariyadi | 182. Bd. Sawahgede |
| 57. Semunu | 120. Bd. Sudi | 183. Bd. Todiwongso |
| 58. Bd. Toyo | 121. Bd. Tretes | 184. BD. Wangangede |
| 59. BD. Watupawon | 122. BD. Watutukang | 185. BD. Weding |
| 60. BD. Winong | 123. BD. Winong | 186. BD. Wuni |
| 61. BD. Yanti | 124. BD. Cengkehan | 187. BD. Cumpleng |
| 62. BD. Cumpleng | 125. BD. Serut | 188. MA. Gayam |
| 63. BD. Kebonturi | 126. BD. Beketung | |

III. WAKTU TANAM DAN JENIS TANAMAN

1. Dengan adanya tanaman padi berumur pendek (\pm 4 bulan), maka dalam 1 (satu) tahun, yang terdiri dari 2 (dua) musim yaitu musim penghujan (M.H) antara bulan Oktober – Maret dan musim kemarau (M.K) antara bulan April – September dapat dibagi dalam 3 (tiga) musim tanam (M.T) yaitu :
 - a. M.T. I Antara bulan September – Desember, disebut musim tanam “*musim hujan*”;
 - b. M.T. II Antara bulan Januari – April, disebut musim tanam “*awal musim kemarau*”;
 - c. M.T. III Antara bulan Mei – Agustus, disebut musim tanam “*musim kemarau*”.
2. Awal tanam pada M.T I di masing-masing Daerah Irigasi disesuaikan dengan ketersediaan air, dengan tetap memperhatikan Musim Tanamnya.

PENJELASAN :

1. Musim Tanam I dan II diperuntukan untuk menanam padi yang berumur pendek.
2. Musim tanam III karena ketersediaan air irigasi sudah sangat berkurang maka untuk daerah-daerah yang cukup air diperuntukan menanam padi sedangkan untuk daerah-daerah yang debitnya berkurang diperuntukan menanam polowijo.
3. Untuk membantu pengadaan bahan baku bagi pabrik gula ditanam tebu pada daerah-daerah irigasi tertentu sesuai dengan kesepakatan Komisi Irigasi Kabupaten. Tanaman tebu ini ditetapkan selama 18 (delapan belas) bulan mulai dari pembukaan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai saat penebangan dan diatur sebagai berikut :
 - a. Tebu I (TS I) diawali pada bulan : Mei – Agustus 2013.
 - b. Tebu II (TS II) yang merupakan keprasan dari TS I, diawali pada bulan Mei – Oktober 2014.

IV. SISTEM PEMBAGIAN AIR

- a. Daerah Irigasi Klambu Kanan
 1. Pada awal musim penghujan berhubung debit yang belum begitu besar pembagian air disesuaikan dengan pembagian golongan yang ditentukan dengan interval waktu 2 (dua) minggu.

2. Pada awal musim kemarau apabila air waduk keadaannya sangat kritis akan diadakan aturan giliran antar golongan.
- b. Daerah Irigasi diluar D.I. Klambu Kanan
1. Pada prinsipnya daerah irigasi ini akan menyesuaikan dengan daerah irigasi klambu kanan.
 2. Berhubung belum ada sistim golongan di daerah ini, pembagian airnya didasarkan pada kesepakatan bersama antar petani pemakai air diperkuat dengan keputusan Komisi Irigasi Kecamatan/Kabupaten.
 3. Air waduk Gembong dan waduk Gunungrowo digunakan untuk membantu tanaman musim kemarau (MT.II dan MT.III)

V. LAIN-LAIN

- a. Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam ini berlaku untuk musim tanam penghujan 2013/2014 dan musim tanam kemarau 2014 dan dapat dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan tahun – tahun berikutnya.
- b. Didalam pengaturan diserahkan kepada masing-masing dinas yang terkait.
 1. Pengaturan teknis irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati.
 2. Pengaturan teknis pertaniannya oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Pati.
- c. Guna memutuskan siklus hama dan keperluan inventarisasi dan perbaikan-perbaikan kerusakan – kerusakan serta pemeliharaan pada jaringan irigasi, diadakan pengeringan total tahunan selama 1 (satu) bulan, yaitu : bulan Agustus 2014.
- d. Guna menjaga keberhasilan tanaman polowijo, berkaitan dengan adanya pengeringan total selama 1 (satu) bulan ini diadakan pengaturan sebagai berikut :
 1. Bagi polowijo yang membutuhkan air relatif lebih banyak ditempatkan pada lahan yang mendapatkan pengairan polowijo lebih dari 2 (dua) bulan (sejak tutup tanam s.d. awal pengeringan)
 2. Bagi polowijo yang membutuhkan air relatif lebih sedikit ditempatkan pada lahan yang mendapatkan pengairan polowijo yang kurang dari 2 (dua) bulan (sejak tutup tanam s.d. awal pengeringan)

- VI.** Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pati.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Penbina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005